

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak dan wewenang yang diberikan pada daerah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik pada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis), untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut beberapa penelitian bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan (Sande, 2013). Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangannya secara baik, menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mardiasmo, 2002).

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin baik penyajian laporan keuangan, akan semakin jelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan haruslah akurat, relevan dan andal untuk menciptakan akuntabilitas keuangan yang dapat digambarkan melalui transparansi yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah (Nordiawan, 2010:73).

Tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah keseluruhan informasi yang diungkapkan secara rinci yang jelas dan ada didalam laporan keuangan. Pengungkapan atas informasi didalam laporan keuangan merupakan suatu elemen dari transparansi fiskal dan akuntabilitas pada penyajian laporan

keuangan yang merupakan hal penting didalam organisasi sektor publik (Diamond, 2007). Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan informasi yang diperlukan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya transparansi atas informasi keuangan pemerintah hal ini bisa mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Akuntabilitas yang efektif juga bergantung pada aksesibilitas publik terhadap laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah. Semakin baik akses maka akan semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah enam kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2011-2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas telah mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas akuntabilitass pengelolaan keuangan daerah yang diterima pemerintah kabupaten banyumas apakah benar dipengaruhi oleh penyajian, pengungkapan dan aksesibilitas laporan keuangan yang baik yang diberikan oleh pemerintah kabupaten banyumas ([www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id)).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, tingkat pengungkapan laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap variabel akuntabilitas keuangan daerah: Nurlaili (2016) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sumiyati (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wiyana (2013) *The presentation of regional financial statement influence positive towards the accountability of regional financial management*. Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Wahida (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil yang berbeda ditemukan pada hasil penelitian Frans

(2011) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Putri (2017) menyatakan tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Sukhemi (2010) yang menyatakan tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sande (2013) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Wahida (2015) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun bersama sama atau serempak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasny (2013) *The accessibility financial statement affects the accountability of regional financial management*. Penelitian Frans (2011) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sande (2013) yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan apakah penelitian ini jika dilakukan di Kabupaten Banyumas akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda mengingat adanya perbedaan karakteristik suatu daerah penelitian dimana Sande melakukan penelitian di Sumatera Barat yang merupakan sebuah provinsi di Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan pada sebuah kabupaten yang wilayahnya lebih sempit dan tentu memiliki karakteristik yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian Sukhemi (2010) dan penelitian Putri (2017) karena berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan informasi yang diperlukan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya transparansi atas informasi keuangan pemerintah hal ini bisa mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Pentingnya penelitian ini dilakukan di kabupaten banyumas adalah karena di kabupaten banyumas belum ada penelitian mengenai pengaruh penyajian, tingkat pengungkapan dan aksesibilitas laporan keuangan pada SKPD yang ada di lingkungan kabupaten banyumas dan untuk mengetahui bagaimana SKPD Banyumas dalam menyajikan, mengungkapkan dan memberikan akses laporannya terhadap pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi laporan keuangan sehingga kabupaten banyumas mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan fokus penelitian ini adalah pengaruh penyajian, tingkat pengungkapan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah ?
2. Apakah tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah ?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Penyajian Laporan Keuangan, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas”.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan.
- b. Bagi pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
- d. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik untuk penelitian-penelitian selanjutnya.